

BAB I

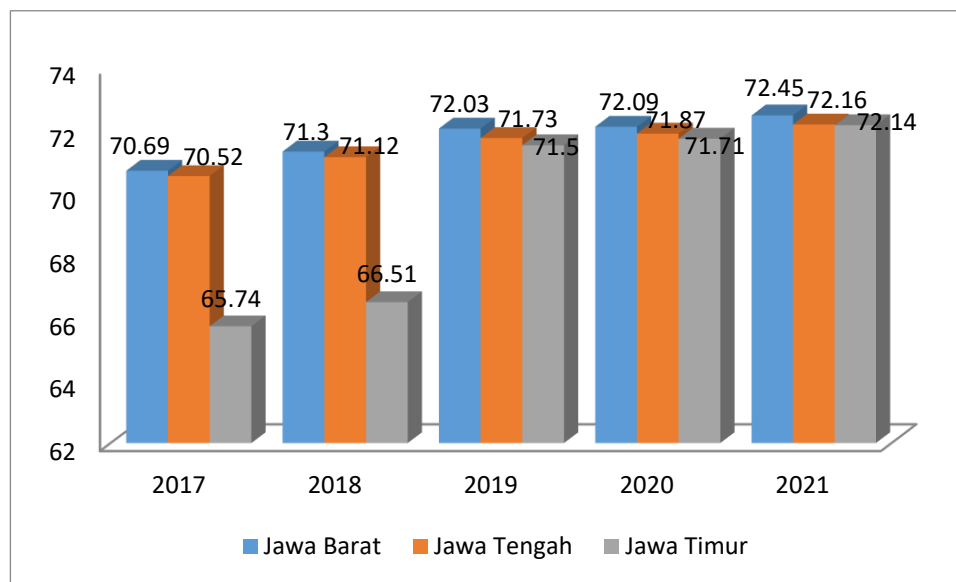
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai kegiatan- kegiatan yang dilakukan suatu negara atau wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses di mana terdapat saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama sehingga diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya (Latuconsina, 2017), keberhasilan dalam peningkatan taraf hidup manusia pada umumnya dilihat dapat dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi diluar itu hal terpenting dari tujuan bernegara adalah keberhasilan bangsa dalam membangun sumber daya manusianya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan yang dimana secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak (Dewi, Yusuf and Iyan, 2016).

Salah satu indikator yang dapat dilihat untuk mengukur kualitas manusia dan skala ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Prasetyoningrum, 2018)(Ningrum, Khairunnisa and Huda, 2020). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan

pembangunan kualitas manusia. Badan Pusat Statistik (BPS) telah merubah beberapa indikator dari IPM yang sudah tidak relevan untuk digunakan dalam perhitungan IPM, yaitu Angka Melek Huruf yang diubah menjadi Angka Harapan Lama Sekolah, lalu Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang diubah menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita (Ningrum, Khairunnisa and Huda, 2020).



Gambar 1.1. IPM Indonesia, Jawa Tengah dan Provinsi Bali

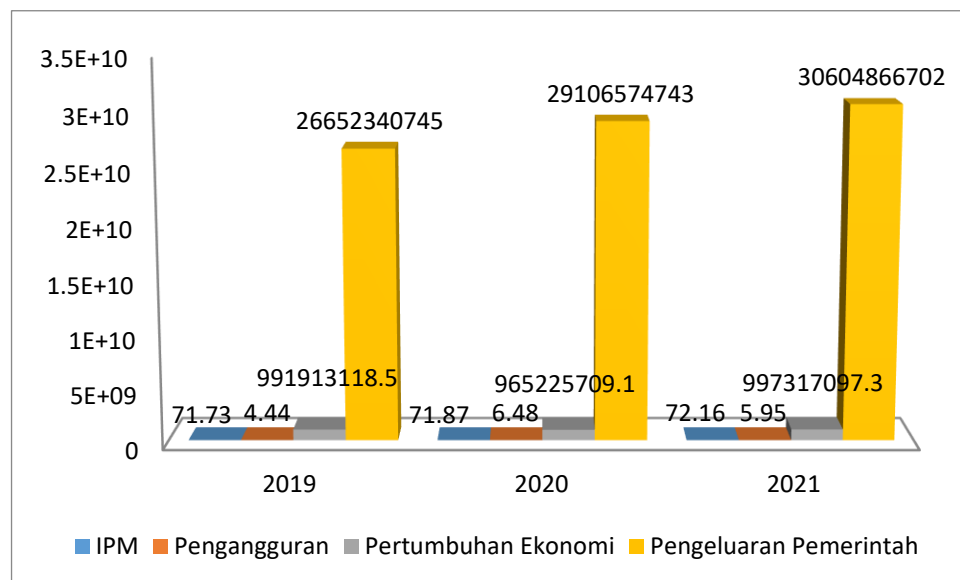
Sumber: BPS Jatim 2020 (data diolah)

Dalam gambar 1.1, Berdasarkan gambar diatas, nilai IPM Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya berbanding lurus dengan target pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu, pengangguran diduga dapat menjadi disparitas dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini karena pengangguran dapat menghambat seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan tingkat pendidikan yang layak, dan tingkat kesehatan

yang layak dapat menyebabkan tidak ada peningkatan pada sumber daya manusia dan dapat menyebabkan kemiskinan meningkat (Ningrum, Khairunnisa and Huda, 2020).

Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis (Mankiw, 2018). Menurut Sukirno dalam Meydiasari dan Soejoto (2017) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi belum memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Ningrum, Khairunnisa and Huda, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, tercatat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah, trendnya selalu meningkat seiring berkurangnya angka pengangguran. Hal ini dapat disebabkan meningkatnya kualitas sistem pendidikan dan kesehatan, sehingga pengembangan sumber daya manusia terus membaik yang dapat mempengaruhi angka Indeks Pembangunan Manusia IPM Jawa Tengah (BPS, 2020). Selain pengangguran, pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat indeks pembangunan manusia pula, hal tersebut diakibatkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka segala tunjangan, kebutuhan dan lain lain akan dapat disediakan oleh pemerintah daerah, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan maupun lapangan pekerjaan, yang secara otomatis dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan

ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara adalah penambahan produksi barang dan jasa, dan perkembangan infrastruktur (Dewi, Yusuf and Iyan, 2017). Dalam pertumbuhan ekonomi, pemerintah memiliki anggaran yang telah di anggarkan untuk direalisasikan dalam kepentingan program kerja pemerintah maupun pembangunan yang dapat dilakukan pada daerah tersebut, hal tersebut menjadi pengeluaran pemerintah atau lebih dikenal sebagai pengeluaran pemerintah. Dalam keterkaitannya Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran pemerintah terlihat saling mempengaruhi, hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2



Gambar 1.2. Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah

Sumber: BPS Jawa Tengah 2020 (data diolah)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami

peningkatan yang cukup baik selama 3 tahun terakhir. Dimana, pada tahun 2019 nilai indeks pembangunan manusia 71,73% dan terus meningkat sampai tahun 2021 sebesar 72,16%. Peningkatan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah dikatakan dalam kategori sedang, hal ini di karenakan selama 3 tahun terakhir nilai IPM di wilayah tersebut masih mengalami peningkatan 60-70% setiap tahunnya.

Pembangunan sektor ketengakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Pengangguran menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai angka maksimal sedangkan tujuan akhir dari pembangunan adalah menciptakan suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk sebanyak 32.443.886 jiwa tingkat pengangguran yang terjadi sebesar 6,21% dan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 15.809.447 jiwa. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami penurunan dan peningkatan yang signifikan sampai dengan tahun 2019 dengan jumlah penduduk sebanyak 34.718.204 jiwa tingkat pengangguran di wilayah tersebut sebesar 4,44%. Namun, di tahun 2020 tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sampai dengan 6,48% kemudian, pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk sebanyak 36.742.501 jiwa tingkat pengangguran mengalami penurunan 5,95% dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 17.835.770 jiwa. Sehingga hal ini diartikan bahwa sudah mulai tersedianya lapangan pekerjaan di masyarakat meskipun masih adanya pandemi covid-19.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. pertumbuhan ekonomi yang tinggi digunakan sebagai sasaran dalam pembangunan. Bagi negara berkembang Menurut UNDP (dalam Ginting, 2008) menyatakan bahwa hingga pada akhir tahun 1999-an pembangunan manusia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). Dari gambar 1.2 menunjukkan bahwa selama tahun 2019-2021 pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah terus berfluktuasi. Sedangkan nilai dari PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2019 sebesar Rp 991.913.118,5 milyar. Namun, pada tahun 2020 PDRB Jawa Tengah turun menjadi Rp 965.225.709,1 milyar dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp 997.317097,3. Hal ini menandakan bahwa secara perlahan Provinsi Jawa Tengah sudah mulai dapat bangkit dalam memperbaiki keadaan perekonomian yang ada di berbagai sektor.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai pengeluaran pemerintahan setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2010 pengeluaran pemerintah provinsi sebesar Rp 6.839.385.978 juta dan terus meningkat sampai dengan 2019 yaitu sebesar Rp 26.652.340.745 juta. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sampai dengan Rp 30.604.866.702 juta.

Penurunan Angka Pengangguran merupakan pekerjaan rumah bagi setiap pemerintah daerah, akan tetapi setiap daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang merupakan aspek penting bagi setiap pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya (Prasetyoningrum, 2018). Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Pengangguran *et al.*, 2018). Maka dari itu pengeluaran pemerintah turut berperan dalam mensejahterkan masyarakatnya,

serta melakukan pembangunan dan pemberdayaan guna mencapai tujuan yang diinginkan (Christia and Ispriyarso, 2019). Melihat fenomena di atas, pembangunan sumber daya manusia menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tingginya pendapatan asli daerah yang bertumpu pada sumber daya alamnya, besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), turunnya angka pengangguran belum mampu membuktikan bahwa masyarakatnya sejahtera dan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi di Provinsi Bali, dilain sisi pengeluaran pemerintah juga belum tentu dialokasikan untuk kepentingan masyarakat secara terfokus. Menurut penelitian, hasil estimasi menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia, yang artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka indeks pembangunan manusia akan ikut meningkat (Dewi, Yusuf and Iyan, 2019).

Berdasarkan penelitian, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat satu sama lain, jumlah pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemakmuran hidup masyarakat melalui berkurangnya pendapatan masyarakat yang akan mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan ekonomi (Ningrum, Khairunnisa and Huda, 2020). Selain itu dari penelitian juga di dapatkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Pengangguran *et al.*, 2018)

Melihat keterkaitan tersebut, pembangunan manusia menjadi hal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya di pengaruhi dari segi Angka Harapan

Lama Sekolah, Harapan Hidup dan Layak Hidup, akan tetapi terdapat permasalahan makro seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah. Dari asumsi tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengangguran terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah?
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah?

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

2. Penelitian mencakup series data selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 pada Provinsi Jawa Tengah
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel independen.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum, sebagai alat untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan serta bahan studi komparatif penelitian lain yang berkaitan dengan analisis pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah
2. Bagi Universitas, dapat menambah acuan akademis dan koleksi perpustakaan Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur & perpustakaan pusat UPN “Veteran” Jawa Timur dalam membahas ataupun memecahkan masalah yang sama.
3. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik dan sekaligus melatih diri untuk memecahkan masalah.

